

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bidang pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek ekonominya yang diukur dengan pendapatan nasional perkapita. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi maka dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi dan begitu juga sebaliknya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka dapat memperlancar pembangunan ekonomi.¹ Salah satu prioritas dari pembangunan adalah menurunkan tingkat kemiskinan agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Kemiskinan merupakan indikator yang penting untuk melihat keberhasilan suatu negara, hal ini disebabkan karena masalah kemiskinan dapat menjadi faktor penghambat pembangunan di masa yang akan datang. Kemiskinan menjadi isu yang sangat penting dalam proses pembangunan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang (NSB) termasuk Indonesia. Ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan faktor yang memicu terjadinya ketimpangan yang dapat menciptakan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang bersifat negatif dan berdampak buruk bagi kemajuan suatu wilayah. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan ini harus segera diatasi oleh setiap negara.²

Terdapat tiga indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, yaitu:

1. Indikator moneter, atau dapat disebut dengan indikator yang berhubungan dengan uang. Uang yang dimaksud yaitu berupa tingkat income yang diterima oleh masyarakat. Di dalam indikator moneter ini indikator yang dapat diukur adalah pendapatan per kapita, karena pendapatan per kapita digunakan untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antar negara maju dengan negara sedang berkembang. Dengan kata lain, pendapatan

¹ Sayifullah Sayifullah and Tia Ratu Gandasari, 'Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6.2 (2016), 236–55 <<https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>>.

² Elvira Handayani Jacobus, Paulus . Kindangen, and Een N. Walewangko, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19.7 (2019), 86–103 <<https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>>.

- per kapita selain dapat memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara, juga dapat menggambarkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi diantara berbagai negara.
2. Indikator non-moneter. Merupakan indikator yang diambil dari beberapa hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Indikator ini memiliki beberapa macam sub indikator yaitu:
 - a. Indikator sosial, yaitu yang membedakan berbagai penelitian tentang cara-cara untuk membandingkan tingkat kesejahteraan.
 - b. Indeks kualitas hidup dan Indeks pembangunan manusia, yaitu untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.
 3. Indikator campuran. Indikator ini disebut dengan campuran karena merupakan campuran dari indikator sosial dan ekonomi yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kriminalitas, angkatan kerja, perumahan, akses media masa dan perjalanan wisata.³

Indikator-indikator di atas memiliki masalah yang paling mendasar yaitu pendapatan per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, angkatan kerja yang semakin meningkat dan tingkat kemiskinan. Hal ini dapat terselesaikan jika pembangunan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Permasalahan kemiskinan dapat ditimbulkan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Tersedianya sumber daya yang berkualitas merupakan syarat penting bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi.

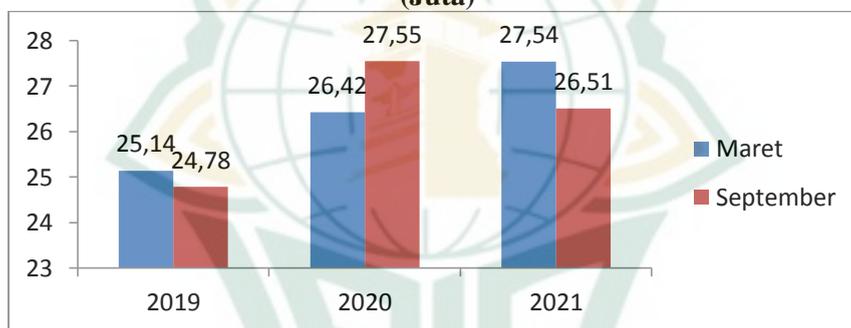
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan di Indonesia tersebar di 34 provinsi di Indonesia, sebagian besar tingkat kemiskinan masih tinggal di daerah-daerah tertentu. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai tingkat kemiskinan tinggi yang menduduki posisi keempat termiskin di Asia Tenggara setelah Timor Leste, Laos, dan Filipina. Dilansir dari Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) melaporkan bahwa proporsi penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan paritas daya beli (berdasarkan 2011 *purchasing power parity*/ PPP) sebesar US\$ 1,9 per hari sebesar 2.7% pada tahun 2019.⁴ Di Indonesia, penelitian sejumlah

³ Lincolin Arsyad, 'Ekonomi Pembangunan Dan Pembangunan Ekonomi', *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05.01 (2015), 1–37.

⁴ 'Daftar Negara Dengan Penduduk Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan Terbanyak Di Asia Tenggara' <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/daftar-negara-dengan-penduduk-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-terbanyak-di-asia-tenggara>> [accessed 2 May 2023].

penduduk miskin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan garis kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan dipakai patokan 2100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, barang dan jasa. Komponen pengeluaran bukan makanan ini dibedakan antara pedesaan dan perkotaan.⁵ Grafik 1.1 menunjukkan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik yang mencakup 34 Provinsi di Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2019 sampai dengan September 2021 disajikan pada grafik 1 sebagai berikut:

Grafik 1.1
Persentase Kemiskinan di Indonesia Tahun 2019-2021
(Juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada periode Maret 2019 sampai dengan September 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada Maret 2020 dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang. Dibandingkan dengan bulan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun 1,04 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,05 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2021 tercatat sebesar 9,71%, menurun 0,43% poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48% poin terhadap September 2020. Garis Kemiskinan pada September 2021 tercatat

⁵ Sayifullah and Gandasari.

sebesar Rp. 486.168,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp. 360.007,- (74.05 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar Rp. 126.161,- (25,95 persen).⁶

Dalam mengatasi hal ini pemerintah terus berupaya membuat program yang bisa menekan angka kemiskinan. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia adalah melalui pengalokasian dana desa yang sudah dijalankan pemerintah sejak tahun 2015. Yang mana pemerintah memberikan transfer dana ke pemerintah daerah kemudian untuk disalurkan kembali ke pemerintah desa guna membantu masyarakat yang berada di pedesaan. Dalam Islam telah dianjurkan mengenai berbagi kepada orang yang membutuhkan, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 38 yang berbunyi:

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ar-Rum:38)”⁷

Urusan pemerintah desa termasuk pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan menjadi kewenangan desa. Dalam hal ini perlu adanya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti dalam Al-Qur'an Surah Shaad ayat 26 mengenai rasa tanggung jawab sebagai pemimpin:

يٰۤاٰوُدُّ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah

⁶ Badan Pusat Statistik, ‘Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2018’, *Berita Resmi Statistik*, 01.05 (2018), 1–8.

⁷ QS. Ar-Rum Ayat 38 (Jakarta: Kemenag RI, 2018).

Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan” (QS. Shaad:26)⁸

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap penting bagi desa. Menurut dari Rifhi Siddiq menyatakan bahwa desa merupakan suatu daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dengan interaksi sosial yang bersifat homogen dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karena umumnya di pedesaan berupa wilayah agraris.⁹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah merubah paradigma tentang pengaturan desa, sehingga sebuah desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan tetapi beralih peran sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Jumlah anggaran Dana Desa yang telah dianggarkan besarnya 10% dari dan diluar Dana Transfer. Dengan jumlah yang hampir selalu meningkat di setiap tahunnya, kebijakan ini dapat dikatakan berjalan beriringan dengan sasaran pembangunan untuk wilayah pedesaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan diharapkan penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk fokus mendukung terwujudnya kemandirian desa.¹¹

Dana desa ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini didukung oleh penelitian Dewi dan Irama tahun 2018 yang menyatakan bahwa dana desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan.¹² Sayifullah dan Gandasari tahun 2016 juga

⁸ QS. Shaad 26 (Jakarta: Kemenag RI, 2018).

⁹ Rifhi Siddiq, *Antropologi Sosial* (Jakarta: Pustaka Setia, 2006).

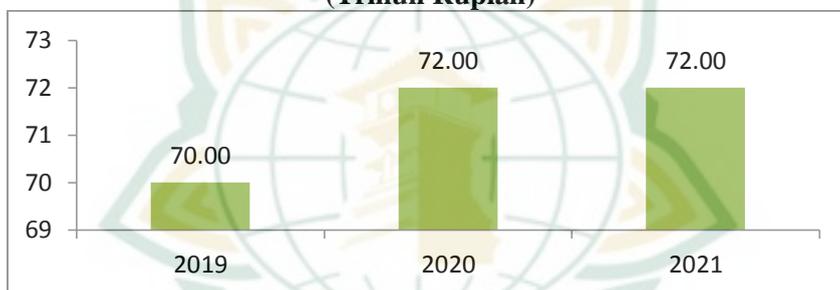
¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘Buku Saku Dana Desa’ (Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), p. 7.

¹¹ Eri Bukhari, ‘Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa’, *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21.2 (2021), 219–28 <<https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540>>.

¹² Ova Novi Irama Ratna Sari Dewi, ‘Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara’, *JURNAL AKUNTANSI DAN*

melakukan penelitian serupa dengan menambahkan variabel Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel independen.¹³ Penelitian oleh Mufti pada tahun 2020 menyatakan bahwa dana desa berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkat dana desa semakin turun angka kemiskinan.¹⁴ Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan dana Rp. 70 triliun untuk seluruh desa di Indonesia. Dengan jumlah dana desa yang besar diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa sehingga bisa memajukan perekonomian dan juga akan mengurangi angka kemiskinan. Berikut grafik dana desa di Indonesia:

Grafik 1.2
Dana Desa di Indonesia Tahun 2019-2021
(Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pertama kali dialokaskannya dana desa di tahun 2015 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19, yaitu sebesar Rp. 20,67 Triliun. Kemudian di tahun 2019 dana desa yang dialokasikan pemerintah pusat naik hampir 300 persen dari tahun 2015 sebesar Rp. 70 Triliun. Pengalokasian dana desa oleh pemerintah pusat ini bertujuan agar setiap desa dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan berbagai program pembangunan seperti program infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Program pembangunan yang dilaksanakan dengan baik diharapkan bisa menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi, 4.2 (2018), 11–18
<<https://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis/article/view/1513>>.

¹³ Sayifullah and Gandasari.

¹⁴ Mufti Arief Arfiansyah, 'Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah', *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1.1 (2020), 2722–8096
<<https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab>>.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah atau negara, dalam hal ini tingkat kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengangguran.

Di dalam kerangka pembangunan ekonomi di suatu daerah, Indeks Pembangunan Manusia ditentukan sebagai salah satu tolok ukur utama yang dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah. Hal ini menandakan bahwa IPM menduduki posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Rendahnya keunggulan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab permasalahan kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia mengukur efektivitas sumber daya manusia. Jika indeks pembangunan manusia buruk maka akan berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, IPM terbentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang, hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.¹⁵ Untuk itu diperlukan dilakukannya beberapa upaya perluasan sumber daya manusia, seperti dengan cara menawarkan program kerja dan pelatihan kerja guna mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.¹⁶

IPM yang merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah, sebaiknya berkorelasi positif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena diharapkan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi. Atau dapat dikatakan bahwa jika nilai IPM tinggi, maka tingkat kemiskinan masyarakat akan rendah. Penelitian oleh Tarmizi et.al pada tahun 2020 menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang artinya semakin tinggi IPM maka kemiskinan bisa dikurangi.¹⁷

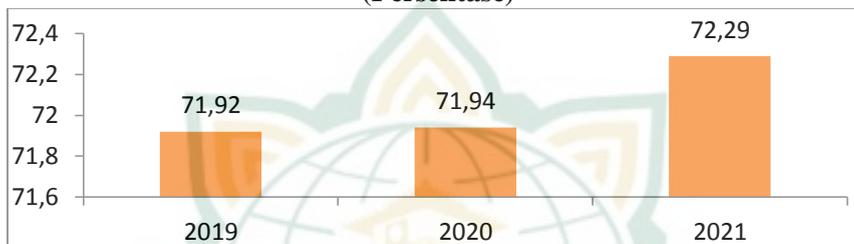
¹⁵ 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>> [accessed 4 May 2023].

¹⁶ Widya Hari Nugraha, 'PENGARUH ALOKASI DANA DESA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA TENGAH THE EFFECT OF VILLAGE FUND ALLOCATION, HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCTS ON POVERTY LEVEL IN CE', 2022.

¹⁷ Heri Tarmizi and Miksalmina Miksalmina, 'PENGARUH DANA DESA DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 5.4 (2020), 201–11 <<https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/16382>> [accessed 2 May 2023].

Pada grafik 1.3 menjelaskan bahwa Indonesia memiliki nilai IPM yang terus meningkat dan menduduki peringkat 107 dari 189 negara dengan skor 71,94. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia menduduki peringkat 5 dari 10 negara di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Grafik 1.3
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2019-2021
(Persentase)



Sumber: Badan Pusat Statistik

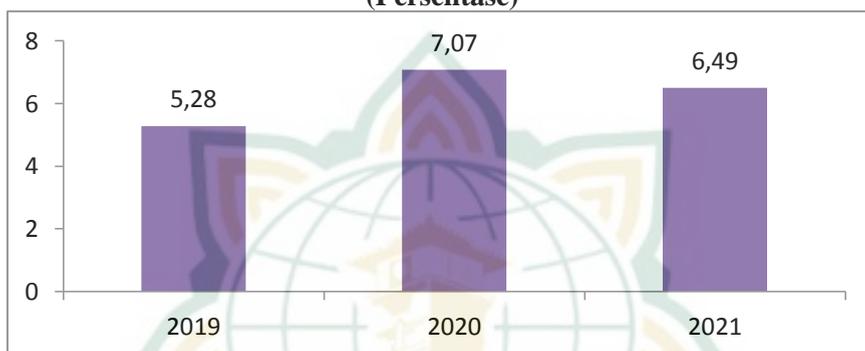
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat diukur berdasarkan umur harapan hidup dan lahir naik 0,13%, pengetahuan meningkat 0,77% dan standar hidup layak meningkat 1,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang hidup sehat, hidup sehat serta dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan pada tahun 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30%.¹⁸

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu pengangguran yang disebabkan kurang, hilangnya atau tidak adanya kesempatan kerja yang pada akhirnya menyebabkan seseorang tidak memiliki sumber pendapatan. Tingginya tingkat pengangguran merupakan ukuran kurang berhasilnya pembangunan di suatu negara. Pengangguran dapat disebabkan oleh angkatan kerja yang tumbuh cepat setiap

¹⁸ Badan Pusat Statistik, 'Berita Resmi Statistik No. 8711Th. XXIV', *Badan Pusat Statistik*, 87, 2021, 1-2
<<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1846/indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-tahun-2021-mencapai-72-29--meningkat-0-35-poin--0-49-persen--dibandingkan-capaian-tahun-sebelumnya--71-94-.html>>.

tahunnya namun tidak diimbangi dengan meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Saparuddin et al. pada tahun 2019 menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.²⁰

Grafik 1.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Indonesia Tahun 2019-2021
(Persentase)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari grafik 1.4 menunjukkan bahwa jumlah pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 persen dibandingkan dengan tahun lalu. TPT di tahun 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan di tahun 2021 TPT sebesar 6,49 persen, turun 0,58 persen poin dibandingkan dengan tahun 2020.²¹ Tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan masalah kemiskinan. Salah satu mekanisme pokok dalam mengurangi kemiskinan di negara sedang berkembang adalah dengan menyediakan kesempatan-kesempatan kerja bagi kelompok miskin.

¹⁹ Indah Dewintari Sinaga, 'Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Penangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2015-2019', *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 21.1 (2020), 1-9.

²⁰ Saparuddin Mukhtar, Ari Saptono, and Asâ€™ad Samsul Arifin, 'ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA', *Ecoplan*, 2.2 (2019), 77-89 <<https://doi.org/10.20527/ECOPLAN.V2I2.20>>.

²¹ Badan Pusat Statistik (BPS), 'BRsBrsInd-20191105172614_rev.Pdf', *Bps.Go.Id*, 2019 <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html>>.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah menganalisis mengenai pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan di berbagai lokasi di Indonesia, seperti penelitian oleh Tarmizi dan Mikasalmi tahun 2020 yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan arah hubungan positif.²² Terdapat juga penelitian yang menyatakan bahwa Dana Desa berpengaruh signifikan namun dengan arah hubungan yang negatif, penelitian ini dilakukan oleh Mufti tahun 2020²³, Sigit et al tahun 2020²⁴, Bukhari tahun 2021²⁵, dan Abdullah tahun 2022²⁶. Di sisi lain terdapat juga penelitian yang menyatakan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, penelitian tersebut dilakukan oleh Lalira et al tahun 2018.²⁷ Dapat diketahui bahwa telah dilakukan banyak penelitian namun menghasilkan penemuan yang beragam. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti kembali, namun penelitian ini menjadi berbeda karena pada penelitian ini menambahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran sebagai variabel independen.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan dijadikan penelitian dengan berjudul **“Pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Pada Periode 2019-2021 (Studi Kasus di 34 Provinsi Indonesia)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap tingkat Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019-2021?

²² Tarmizi and Miksalmi.

²³ Arfiansyah.

²⁴ Tri Angga Sigit and Ahmad Kosasih, ‘Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota Di Indonesia’, *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5.2 (2020), 105–19 <<https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.170>>.

²⁵ Bukhari.

²⁶ Ristanto Abdullah, ‘Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Gorontalo’, *Jambura Economic Education Journal*, 4.2 (2022), 165–76.

²⁷ Dianti Lalira¹, Amran T. Nakoko², and Ita Pingkan F. Rorong³, ‘Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud’, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18.4 (2018), 62–72.

2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Indonesia 2019-2021?
3. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan pada Indonesia 2019-2021?
4. Apakah Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran berpengaruh simultan terhadap tingkat Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019-2021?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh tingkat Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia.
4. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam mengkaji ilmu pengetahuan tentang penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi pembangunan. dan menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi syariah.
 - b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan serta rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
Diharapkan penelitian ini dapat memperluas pemahaman bagi mahasiswa mengenai ekonomi pembangunan.
 - b. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melihat perkembangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat guna memudahkan dalam memahami sebuah penelitian. Berikut ini merupakan sistematika penulisan skripsi yang hendak peneliti buat:

1. Bagian Awal

Bagian ini mencakup halaman judul, pengesahan mejelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/ grafik.

2. Bagian Isi

Bagian ini meliputi 5 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Membahas terkait deskripsi teori yang dipakai dalam acuan kegiatan penelitian yang mencakup deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, populasi serta sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data.

BAB IV : Analisis dan Pembahasan

Berisikan terkait gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : Penutup

Memuat kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Memuat daftar pustaka yang dipakai untuk bahan rujukan pembuatan skripsi, lampiran pendukung isi penelitian serta daftar riwayat hidup.